

OPTIMALISASI PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA SIBOLGA PROVINSI SUMATERA UTARA

Yusman Tri Klavier Banjarnahor
NPP. 30.0163

Asdaf Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Keuangan Publik
Email: klavierbanjarnahor@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Bahrullah Akbar, SE, MBA, CIPM, CA, CPA, CSFA,
C.FrA, CGCAE, QGIA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Regional autonomy is so expanded, of course the government needs supervision in managing the implementation of household management, both external examiners carried out by the Audit Board of the Republic of Indonesia and internal supervision carried out by the Regional Inspectorate. The Inspectorate of Sibolga City as the internal supervisor needs to optimize the Inspectorate's supervision in managing the APBD. **Purpose:** This study aims to determine the optimization of inspectorate supervision in the management of APBD in Sibolga City, to determine the obstacles to optimizing inspectorate supervision in the management of APBD in Sibolga city and to determine efforts to overcome obstacles to Inspectorate supervision in APBD management. **Methods:** This research uses qualitative methods with a descriptive approach and data collection techniques in the form of interviews, observation, and document studies. **Results/Findings:** Inspectorate supervision in the management of APBD in Sibolga City has been going well because it is in accordance with the Annual Supervision Work Program, but there are still deficiencies that make it not optimal such as Human Resources, Facilities and Infrastructure and Budget. to optimize supervision of APBD management in Sibolga City which is carried out by the Sibolga City Inspectorate. **Conclusion:** the optimization of inspectorate supervision is good but there are deficiencies that make it not optimal.

Keywords: Optimization, Supervision, Inspectorate, APBD

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Otonomi daerah yang sedemikian diperluas tentunya pemerintah membutuhkan pengawasan dalam pengelolaan pelaksanaan pengelolaan rumah tangga baik pemeriksa eksternal yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Daerah. Inspektorat Kota Sibolga selaku pengawas internal perlu melakukan optimalisasi pengawasan Inspektorat dalam pengelolaan APBD. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengawasan inspektorat dalam pengelolaan APBD di Kota Sibolga, untuk mengetahui hambatan optimalisasi pengawasan inspektorat dalam pengelolaan APBD di kota Sibolga serta untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan pengawasan Inspektorat dalam pengelolaan APBD. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. **Hasil/Temuan:** Pengawasan inspektorat dalam pengelolaan APBD di Kota Sibolga sudah berjalan baik karena sudah sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan, namun masih ada kekurangan yang membuatnya belum optimal seperti Sumber Daya Manusia, Sarana dan Pra-sarana dan Anggaran. untuk optimalisasi pengawasan pengelolaan APBD di Kota Sibolga yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Sibolga. **Kesimpulan:** optimalisasi pengawasan inspektorat sudah baik namun ada kekurangan yang membuatnya belum optimal.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pengawasan, Inspektorat , APBD

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wewenang dalam otonomi pemerintah daerah dalam Undang- Undang ini antara lain Bupati/Walikota memiliki wewenang yang lebih luas karena bukan lagi sebagai bawahan Gubernur secara hierarki, akan tetapi sebagai pimpinan tertinggi di lingkup kepala daerah di tingkat lokal. Bupati dan Walikota memiliki wewenang penuh atas daerah kekuasaannya dengan mekanisme kontrol antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif harus dengan persetujuan dan pengawasan legislatif, begitu pula sebaliknya.

Otonomi daerah yang sedemikian diperluas tentunya pemerintah daerah membutuhkan pengawasan dalam pengelolaan pelaksanaan pengelolaan rumah tangga pemerintahan daerah baik pemeriksaan dari sisi eksternal maupun pengawasan internal pemerintahan daerah itu sendiri. karena pada dasarnya otonomi daerah diterapkan dengan prinsip otonomi luas, otonomi nyata, prinsip otonomi yang bertanggung jawab.

Pemeriksaan Eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab Pemerintah Pusat maupun Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Bank Indonesia, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, serta Lembaga dan atau Badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Pengawasan pengelolaan Pemerintahan Daerah secara internal dilakukan oleh Inspektorat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Kota Sibolga dalam administrasi dikoordinasikan melalui Sekretaris Daerah Utama.

Inspektorat Kota Sibolga adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan urusan Kota di Kota Sibolga yang dibentuk berdasarkan nomenklatur baru yaitu Perda No. 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga. Lebih lanjut tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Sibolga diatur dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Sibolga.

Strategi menguatkan struktur organisasi inspektorat kota Sibolga sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan kedudukan yang akan diawasi pada hal tersebut yaitu sekretaris daerah dan organisasi perangkat daerah. Pelaksanaan tanggung jawab yang beragam dibutuhkan dukungan dana supaya bisa terlaksana dengan maksimal dan mampu mencapai target yang sudah ditentukan. Hingga hari ini dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dan pemantauan atas penerapan beban anggaran pendapatan serta belanja daerah sangat sedikit serta dinilai sangat kurang. Banyaknya tanggung jawab yang diberikan kepada inspektorat kota Sibolga membutuhkan adanya support dari sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab tanggung jawab yang sudah diberikan. Tidak hanya sumber daya yang cukup untuk memberikan

dukungan dalam mencapai tujuan yang diinginkan namun harus diperhatikan peningkatan sumber daya manusia yang ada pada Inspektorat Kota Sibolga.

Tingkat opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri dari 4 tingkatan opini yang dapat dikatakan sebagai indikator kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang dinilai dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu:

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); Wajar Dengan Pengecualian (WDP); Tidak Wajar (TW); dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut yang statusnya paling baik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mana opini tersebut menandakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah tersebut dilakukan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan optimal. Dalam meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Daerah tentunya harus memiliki progres tidak mungkin langsung mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara tiba-tiba. Kota Sibolga dalam hal pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2017 meraih opini Wajar dengan Pengecualian kemudian tahun 2018 sampai tahun 2021 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah Kota Sibolga dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil bersama dari kerja keras Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan tentu saja Inspektorat Kota Sibolga.

Inspektorat Kota Sibolga selaku pengawas internal pemda perlu melakukan optimalisasi dalam pengawasan Inspektorat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga, untuk mengontrol pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga serta dalam rangka mempertahankan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Resume Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh sebuah kendala untuk melaksanakan upaya pengendalian intern atau ketidakpatuhan kepada regulasi undang-undang pada Laporan Keuangan yang ada pada Pemerintah Kota Sibolga yaitu pengelolaan pendapatan daerah belum optimal dan realisasi belanja perjalanan dinas dua belas (12) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.125.840.610,00. Sesuai dengan keterbatasan yang ada, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan Walikota Sibolga supaya memberikan perintah kepada Inspektur lebih optimal melakukan pengendalian pelaksanaan perjalanan dinas.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Strategi menguatkan struktur organisasi inspektorat kota Sibolga sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan kedudukan yang akan diawasi pada hal tersebut yaitu sekretaris daerah dan organisasi perangkat daerah. Pelaksanaa tanggung jawab yang beragam dibutuhkan dukungan dana supaya bisa terlaksana dengan maksimal dan mampu mencapai target yang sudah ditentukan. Hingga hari ini dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dan pemantauan atas penerapan beban anggaran pendapatan serta belanja daerah sangat sedikit serta dinilai sangat kurang. Banyaknya tanggung jawab yang diberikan kepada inspektorat kota Sibolga membutuhkan adanya support dari sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab tanggung jawab yang sudah diberikan. Tidak hanya sumber daya yang cukup untuk memberikan dukungan dalam mencapai tujuan yang diinginkan namun harus diperhatikan peningkatan sumber daya manusia yang ada pada Inspektorat Kota Sibolga.

1.3 Penelitian Terdahulu

Tujuan dari dipergunakannya penelitian sebelumnya adalah agar dijadikan penulis sebagai acuan dalam meneliti, sehingga penulis akan bisa memperbanyak teori nantinya dipergunakan ketika meneliti. Melalui penelitian sebelumnya, ternyata tidak ditemukan penelitian yang sama persis dengan apa yang hendak penulis teliti. Penulis memasukkan penelitian-penelitian sebagai acuan untuk memperkaya bahan penelitian. Penelitian sebelumnya yang penulis uraikan sebagai berikut, Penelitian Irmayanti Siregar yang berjudul Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dilihat dari pemeriksaan, Pencarian belum maksimal sebab aparatur pengawas yang kurang mempunyai keterampilan pada bidang pekerjaan yang diberikan serta kurang adanya sarana maupun prasarana memadai untuk melakukan evaluasi. Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. (Hermin Setiawan dan Tri Sukirno Putro) Hasil yang diperoleh menggambarkan jika faktor yang menyebabkan LKPD Kabupaten Indragiri Hulu memperoleh pemikiran penyangkalan sebab terdapat pada sistem akuntansi serta pelaporan keuangan yang ada pada daerah melemah kemudian juga belum sejalan dengan SAP, kemudian sumber daya manusia juga tidak cukup, tidak terdapat inventarisasi aset dan utang atau piutang daerah serta SPIP tidak seluruhnya patuh pada aturan yang sudah ditetapkan. Fungsi dan Tugas Inspektorat Dalam Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Pemerintahan Karo Sumatera Utara. (Tenun Sembiring) Hasil yang diperoleh pada penelitian menggambarkan jika kegunaan dan tanggung jawab Inspektorat ketika melakukan upaya dalam mengendalikan barang kepunyaan daerah di pemerintahan Kabupaten Karo belum terimplementasikan dengan maksimal. Pengawasan Lembaga Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Malang (Studi Di Inspektorat Kabupaten Malang) (Faizal Bakri) Hasil yang diperoleh pada penelitian ini pertama, kegiatan yang dilaksanakan oleh inspektorat Kabupaten Malang supaya bisa membentuk pemerintahan desa yang bersih serta bebas dari KKN. Sesuai dengan kegiatan pengawasan inspektorat melakukan pengawasan dengan langsung turun ke lapangan. Kemudian dapat diketahui faktor yang menghambat kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa ada di SDM yang tidak berkualitas dan jumlahnya cukup banyak. Dalam kurun waktu satu tahun 120 desa dengan total auditor 24 juga bisa mempunyai potensi KKN apabila tidak diawasi. Efektifitas Pengawasan Keuangan Pada Inspektorat Kota Makassar (Hermin, 2019) Dilaksanakannya upaya pengawasan daerah yang diimplementasikan oleh inspektorat kota Makassar bisa disimpulkan jika upaya persiapan upaya untuk mengawasi melaksanakan membentuk laporan serta memberikan tunjangan kepada kegiatan pengawasan sudah berjalan dengan baik dan berbagai faktor yang memberikan pengaruh pelaksanaan beragam fungsi pengawasan ketika membentuk pemerintahan di Kota Makassar merupakan aparatur yang mempunyai keterampilan dalam mengikuti pelatihan sehingga sarana dan prasarana juga memadai dan bisa dilaksanakan pemko makassar.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

1. Perbedaan

Perbedaan dari penelitian ini yaitu lokus penelitian, yang mana pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara.

2. Persamaan

Penelitian di atas memiliki kesamaan seperti kesamaan fokus penelitian yaitu di bidang pengawasan tentang bagaimana pengawasan Inspektorat.

3. Keunggulan Penelitian Ini

Keunggulan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ada dalam penggunaan data yakni menggunakan data Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sibolga pada tahun 2017-2021 dimana penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan data lama.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengawasan inspektorat dalam pengelolaan APBD di Kota Sibolga, untuk mengetahui hambatan optimalisasi pengawasan inspektorat dalam pengelolaan APBD di kota Sibolga serta untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan pengawasan Inspektorat dalam pengelolaan APBD.

II Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menurut (Sugiyono, 2017) merupakan suatu penelitian yang berfokus pada pengukuran fenomena dan juga keadaan yang bersifat abstrak dan tidak bisa secara langsung diukur menggunakan angka-angka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang menurut Lubis *et.al* (2017:12) merupakan bidang ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari tentang tata cara penyusunan dan penyajian suatu data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.

Penelitian ini dalam teknik pengumpulan data berupa metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Inspektur Inspektorat Daerah Kota Sibolga, Sekretaris inspektorat daerah Kota Sibolga, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III. Adapun analisisnya menggunakan teori pengawasan yang optimal oleh Handoko (Handoko, 2016) yang menyatakan bahwa dalam pengawasan setidaknya ada lima tahap dalam proses pengawasan, yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan pengambilan tindakan evaluasi dan korektif.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Optimalisasi Pengawasan Inspektorat dalam Pengelolaan APBD di Kota Sibolga

Penerapan ukuran dan penilaian yang diimplementasikan inspektorat daerah kota Sibolga kepada pengawasan yang dijalankan yaitu melaksanakan pemantauan rutin kepada keuangan yang dikelola oleh pemerintahan daerah. Terdapat berbagai macam faktor yang menjadi pengaruh tanggung jawab dan fungsi inspektorat ketika menjalankan kegiatan pengawasan.

Faktor utama yang menjadi pengaruh yaitu komunikasi. Komunikasi sangat berkaitan untuk memperoleh keberhasilan dalam mencapai tujuan dari penerapan kebijakan. Penerapan yang baik dapat diperoleh apabila putusan sudah sesuai dengan yang ditetapkan. Pengetahuan tentang yang dikerjakan apabila komunikasinya baik maka keputusan dan regulasi juga harus dilaksanakan. Kebijakan yang dikomunikasikan juga harus maksimal dan konsisten. komunikasi dibutuhkan

supaya setiap pembentuk kebijakan serta para implementor bisa konsisten ketika menjalankan seluruh kebijakan yang akan diimplementasikan kepada masyarakat. Tanggung jawab inspektorat daerah kota Sibolga harus bisa mengimplementasikan semua tanggung jawab selaku internal auditor pemerintah Kota Sibolga dengan menciptakan hubungan dan komunikasi yang berkelanjutan.

Faktor kedua yang memberikan pengaruh terhadap keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ketika kegiatan pengawasan yaitu sumber daya. Sumber daya adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari staf kewenangan dan sarana. Sumber daya yang utama pada pengimplementasian kebijakan yaitu staf. Kegagalan yang dihadapi ketika pengimplementasian kebijakan yaitu salah satunya diakibatkan staf yang kurang cukup memadai atau bahkan tidak mempunyai kekompetenan. Penambahan total start serta implementator saja tidak cukup namun dibutuhkan kecukupan staf dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan maupun mengimplementasi pertanggungjawaban yang diharapkan oleh kebijakan yang sudah dibuat. Kewenangan yang diberikan kepada pejabat pengawas juga menjadi indikator yang bisa memberikan pengaruh terhadap sumber daya. Kewenangan adalah otoritas maupun estimasi untuk setiap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam ruang lingkup politik. Saat wewenang itu nihil maka kekuatan seluruh implementor di mata masyarakat tidak dapat dilaksanakan sehingga bisa menjadi faktor kegagalan penerapan kebijakan.

Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Sibolga terhadap urusan keuangan secara umum khususnya APBD di Kota Sibolga telah dilaksanakan mulai dari sasaran, standar, pelaksanaan pengawasan, hingga hasil pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkala agar penggunaan anggaran sesuai dengan DPA yang telah disetujui oleh DPRD.

Penulis menganalisis Optimalisasi Pengawasan Inspektorat dalam Pengelolaan APBD di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara menggunakan pendapat dari Handoko yang menyatakan bahwa Pengawasan yang optimal dapat terjadi pada lima tahap, yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan pengambilan tindakan evaluasi dan korektif. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.2 Penetapan Sasaran dan Standar Pelaksanaan

Pengimplementasian aktivitas pengawasan pengelolaan APBD dilaksanakan dengan sangat diperhatikan untuk meminimalisir adanya kesalahan pada penerapan strategi mengelola APBD Kota Sibolga. Sejalan dengan hasil yang didapatkan maka penulis melakukan penelitian menggunakan beberapa indikator yang dianalisis dalam program diantaranya: Sasaran Tingkat Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Standar Regulasi Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah

3.3 Penetapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan pada pengimplementasian pengawasan APBD harus tepat sasaran di instansi Kota Sibolga supaya tidak terdapat kerugian karena rasa ceroboh dari ketetapan kawasan. Indikator yang digunakan pada analisis peneliti dan dimensi optimalisasi yaitu:

Sasaran dan Target dari Pelaksanaan pengawasan Pengelolaan APBD dan Dokumen Terkait Tugas dan Fungsi Pengawasan Intern Inspektorat

3.4 Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Indikator yang dianalisis peneliti dalam dimensi Pengukuran pelaksanaan Kegiatan di antaranya: Prosedur dan Tata Cara Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah dan Pelaksanaan Pengelolaan APBD

3.5 Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar Pelaksanaan

Indikator yang dianalisis peneliti dalam dimensi Tercapainya tujuan di antaranya: Tingkat Kinerja APBD Pemerintah Kota Sibolga, Sasaran dan Target APBD, Realisasi APBD, dan Hambatan Selama Pelaksanaan Pengawasan

3.6 Pengambilan Tindakan Evaluasi dan Korektif

Indikator yang dianalisis peneliti dalam dimensi perubahan nyata diantaranya: Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut.

3.7 Hambatan Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengelolaan APBD

Beberapa Persoalan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah yaitu :

1. Kendala Teknis Pengawasan yang terdiri dari : a. Keterbatasan SDM aparat pengawas, Jika dilihat dari kualifikasinya daerah semakin instansi pengawas fungsional harus memiliki total aparatur sipil negara yang mampu memenuhi standar yang sudah ditentukan untuk menjadi SDM yang berkualitas. Di kawasan daerah sulit untuk mendapatkan pegawai yang bisa diangkat menjadi pengawas pemerintahan serta auditor dan b. Keterbatasan anggaran pengawasan. Anggaran yang terbagus untuk mengimplementasikan pengawasan tentunya bisa menjadi faktor penghambat secara teknis tetapi sulit untuk menemukan solusinya sebab hal ini berhubungan dengan pembagian dana yang adil dan harus sejalan dengan keperluan instansi pemerintahan.
2. Kendala Politik, Tanggung jawab sebuah instansi yang sedang diawasi ataupun sedang di audit yaitu memaparkan sebuah pernyataan serta informasi yang benar dalam tahapan pengawasan. Tetapi pada pelaksanaannya hal ini kadang susah untuk diimplementasikan karena kebutuhan politik juga mempengaruhi hal-hal yang terdapat pada birokrasi daerah. dan
3. Kendala Yuridis, Kendala yuridis sangat terkait dengan hal, yaitu kurang luasnya kewenangan yang terdapat pada aparat pengawas untuk memaksimalkan pengawasan. Selain itu, terkadang masih kurangnya kewenangan lembaga pengawas untuk memaksa instansi yang diawasi agar hasil pemeriksaan ditindaklanjuti.

3.8 Upaya dalam optimalisasi Pengawasan Inspektorat dalam menghadapi hambatan dalam pengelolaan APBD di Kota Sibolga

Beberapa langkah yang diambil oleh Inspektorat dalam mengatasi hambatan terhadap pengawasan antara lain:

1. Memaksimalkan SDM di lingkup Inspektorat Kota Sibolga
Dengan cara mempertahankan dan atau meningkatkan mutu audit guna peningkatan SDM harus memelihara kompetensi auditornya melalui pendidikan profesional berkelanjutan, yaitu diikutsertakan pelatihan, diklat-diklat pengawasan, serta bimtek pengawasan..
2. Mengefisiensikan penggunaan anggaran
Terbatasnya anggaran mendorong Inspektorat Kota Sibolga untuk melakukan efisiensi terhadap penggunaan dana dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Inspektorat Kota Sibolga dituntut harus memprioritaskan kegiatan pembinaan dan pengawasan aparatur sipil negara berdasarkan perencanaan (base on plan) dan pencapaian target rencana kerja yang telah disepakati bersama oleh APIP (base on target), dan
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/dinas pemerintah kota Sibolga.

Inspektorat Kota Sibolga menjalin lebih banyak kerjasama dengan Walikota Sibolga untuk melakukan kegiatan pembinaan pada setiap instansi/dinas pemerintah Kota Sibolga. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada aparatur sipil negara (ASN) berkenaan dengan peran dan fungsi Inspektorat Kota Sibolga yang seharusnya.

3.9 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengawasan Inspektorat dalam pengelolaan APBD di kota Sibolga sudah baik karena sudah sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan berbeda dengan temuan (Herdi Setiawan dan Tri Sukirno Putro) LKPD Kabupaten Indragiri Hulu memperoleh opini disclaimer sebab terdapat pada sistem akuntansi serta pelaporan keuangan yang ada pada daerah melemah kemudian juga belum sejalan dengan SAP, namun masih ada kekurangan yang membuatnya belum optimal seperti kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat sama halnya dengan temuan (Irmayanti Siregar, 2019) pengawasan dilihat dari pemeriksaan belum maksimal sebab aparatur pengawas yang kurang mempunyai keterampilan pada bidang pekerjaannya, namun berbeda dengan temuan (Hermin, 2019) fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kota Makassar adalah meliputi aparatur yang memiliki skill (telah mengikuti DIKLAT), pengetahuan dibidang pekerjaan yang ditangani, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan di kota Makassar yang dilakukan oleh inspektorat kota Makassar.

Keterbatasan anggaran pengawasan dikarenakan pembagian anggaran untuk instansi yang harus merata tapi disisi lain harus dibagi secara adil dengan instansi lain.

IV KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan di Inspektorat Daerah kota Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pengawasan inspektorat dalam pengelolaan APBD di Kota Sibolga sudah berjalan baik karena sudah sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), walaupun masih ada kekurangan yang membuatnya belum optimal. Kekurangan ini dikarenakan oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh Inspektorat Pengawasan dan Pengelolaan Kota Sibolga masih kurang sehingga belum bisa berjalan secara optimal. Sumber daya manusia dalam beberapa keahlian untuk menggunakan sarana penunjang pengawasan pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan untuk bisa memaksimalkan fungsi pengawasan.

2. Hambatan yang dialami oleh Inspektorat daerah dalam Optimalisasi Pengawasan APBD Di Kota Sibolga ada 3 bidang yaitu: Kendala Teknis, Kendala Politik, dan Kendala Yuridis.

3. Inspektorat Kota Sibolga dalam mengatasi hambatan dalam berabagai bidang adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan, pendidikan dan pembinaan kepada SDM dalam inspektorat. 2. Berkenaan dengan keterbatasan anggaran inspektorat melakukan efisiensi secara maksimal. Sementara berkenaan dengan aturan hukum belum ada penindaklanjutan dari pemerintah pusat dan kementerian.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan optimalisasi pengawasan Inspektorat dalam pengelolaan APBD di Kota Sibolga untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

V UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kota Sibolga beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Bahrullah. 2002. *Fungsi Manajemen Keuangan Daerah*. Majalah Pemeriksa. Edisi No.87, Oktober.
- Akbar, Bahrullah & Pramono, Agus Joko. 2020. *Organisasi Sektor Publik dan Audit Kinerja*. Jakarta: Institut Pemeriksa Keuangan Negara.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Asbi. 2017. *Pengawasan Pembangunan Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyarah*.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badrudin, Rudy, 2012. *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Bakri, Faizal. 2019. *Pengawasan Lembaga Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Malang (Studi Di Inspektorat Kabupaten Malang)*.
- Handoko, T. Hani. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*. Yogyakarta : BPFE.
- Handoko, T. Hani. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Herdi Setiawan.& Tri Putro. 2013. *Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*.
- Hermin. 2019. *Efektifitas Pengawasan Keuangan Pada Inspektorat Kota Makassar*.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar Manajemen*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Satriadi. 2016, *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru*. Jurnal penelitian. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, Kepulauan Riau
- Sembiring, Tenun. 2009. *Fungsi dan Tugas Inspektorat Dalam Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Pemerintahan Karo Sumatera Utara*.
- Siagian, Sondang. P., 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan \Ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Simbolon, Nenti. 2016. *Tinjauan Han Terhadap Peranan Inspektorat Daerah Sebagai Pengawasan Internal Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah*

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (Studi Kantor Inspektorat Kabupaten Toba Samosir).

Siregar, Irmayanti. 2019. *Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.*

Siringoringo, H. 2005. *Seri Teknik Riset Operasi Pemrograman Linear.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, CV

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.* Bandung: PT Refika Aditama

Sujarweni, Wiratna. 2015. *SPSS Untuk Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Suwatno & Tjutju Yuniarsih. 2013 *Manajemen sumber daya manusia.*

Bandung: Alfabeta

Syafitri Vintia Geri, Afrianti, Vivi Herlina. (2020). *Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci.*

